

**ANALISIS PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP
PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN DI PROVINSI ACEH, SUMATERA UTARA,
RIAU DAN SUMATERA BARAT**

**NOVI NATALIA PADANG
ROMASI LUMBAN GAOL**

Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi Universitas Katolik Santo Thomas
novipadang06@gmail.com, romasilumbangaol@yahoo.co.id

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine and analyze the effect of local revenue on development in the provinces of Aceh, North Sumatra, Riau and West Sumatra. The population of this study is the Provinces of Aceh, North Sumatra, Riau and West Sumatra with the observation year 2010 to 2017. The sample was selected using the saturated sample method. The data was processed using the panel data regression statistical test method. The results of this study prove that based on the simultaneous test results, regional taxes, regional levies, separated regional wealth results, other valid PAD simultaneously, have a significant effect on the GRDP variable.

Keywords: *Regional Taxes, Regional Levies, Results of Separated Regional Wealth Management, Others Legitimate PAD, Gross Regional Domestic Product.*

PENDAHULUAN

Salah satu sumber penerimaan daerah terbesar yang berasal dari dalam wilayahnya sendiri adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang mana pendapatan asli daerah menjadi tolak ukur dalam menilai tingkat kemandirian pemerintahan daerah. Pendapatan asli daerah terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Masalah yang sering muncul dalam melaksanakan otonomi daerah adalah prospek kemampuan pembiayaan pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan fungsinya sebagai penyelenggara pembangunan, penyelenggara pemerintah serta melayani masyarakat setempat sejalan dengan dinamika kehidupan masyarakat yang harus dilayani. Oleh karena itu penyelenggaraan kegiatan pemerintahan daerah senantiasa terus meningkat sehingga biaya yang dibutuhkan juga akan bertambah. Peningkatan penerimaan daerah harus senantiasa diupayakan secara periodik oleh setiap daerah otonom melalui penataan administrasi pendapatan daerah yang efisien dan efektif sesuai dengan pola yang telah ditetapkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan petunjuk pelaksanaan.

Tabel 1.

Data Realisasi PAD dan PDRB Aceh, Sumatera Utara, Riau, dan Sumatera Barat 2013-2020

TAHUN	2015	2017	2018	2019	2020
ACEH					
PAD	2.379.091.058.118	3.657.102.575.209	4.203.042.379.719	4.718.252.298.680	4.663.157.334.924
PDRB	1.213.312.000.000	1.278.970.600.000	1.290.926.500.000	1.373.026.700.000	1.464.833.500.000
SUMATERA UTARA					
PAD	6.753.057.062.097	7.883.507.715.895	8.749.673.161.226	9.136.812.725.13	1.073.200.210.90
PDRB	4.039.330.500.000	5.219.549.500.000	5.717.220.100.000	6.283.941.600.000	6.840.694.900.00

RIAU					
PAD	4.392.790.005.967	5.196.067.072.343	5.603.073.876.469	4.954.746.111.06	6.299.532.077.278
PDRB	6.074.984.500.000	6.793.958.600.000	6.527.616.300.000	6.816.990.300.000	7.047.975.800.000
SUMATERA BARAT					
PAD	2.314.905.820.708	3.090.483.522.856	3.455.962.733.434	3.646.984.945.63	4.663.157.334.400
PDRB	1.468.998.200.000	1.649.442.500.000	1.799.519.800.000	1.964.429.300.000	2.145.852.200.000

Sumber : www.djpk.kemenkeu.go.id dan www.bps.go.id

Dari tabel 1. terlihat adanya penurunan Pendapatan Asli Daerah, di Provinsi Aceh Tahun 2020. Secara total, PDRB Provinsi Aceh atas dasar harga (atas dasar harga) Berlaku meningkat. Di Provinsi Riau terlihat adanya penurunan Pendapatan Asli Daerah, di Tahun 2019, dan kembali meningkat pada tahun 2020, sementara PDRB pada tahun 2019 meningkat dari tahun 2018.

Oleh karena itu apabila nilai pendapatan asli daerah Provinsi Aceh meningkat, maka pada akhirnya akan membentuk potensi bagi daerah. Potensi daerah tersebut pada akhirnya akan membentuk suatu kekuatan dan kemampuan bagi daerah dalam mendorong perkembangan pembangunan di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Riau dan Sumatera Barat yang lebih baik. Berdasarkan uraian di atas, maka perlu ada penelitian untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel pendapatan asli daerah terhadap perkembangan pembangunan di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Riau dan Sumatera Barat.

LANDASAN TEORI

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori agensi menjadi grand teori dalam penelitian ini, masyarakat atau publik yang berada dalam posisi prinsipal memiliki hak untuk menilai dan mengevaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah agar mampu memberikan pelayanan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Pemerintah daerah yang telah diberi wewenang untuk mengelola anggaran dari masyarakat melalui pembayaran pajak dan retribusi daerah dituntut untuk menjadi agen yang mampu memenuhi harapan dan kepentingan masyarakat. Dua sisi kepentingan yang berbeda ini seringkali menimbulkan konflik, publik seringkali tidak puas dengan hasil kinerja yang dilakukan oleh pemerintah daerah sedangkan pemerintah daerah selaku agen lebih mementingkan kesejahteraan sendiri, maka diperlukan regulasi untuk mengatur perbedaan kepentingan ini. Jansen dan Meckling dalam Santoso dan Joni (2012). Hendriksen (2005) dan Scott (2003) dapat digambarkan bahwa hubungan rakyat dengan pemerintah dapat dikatakan sebagai hubungan keagenan, yaitu hubungan yang timbul karena adanya kontrak yang ditetapkan oleh rakyat (sebagai principal) yang menggunakan pemerintah (sebagai agent) untuk menyediakan jasa yang menjadi kepentingan rakyat. Untuk mengawasi perilaku pemerintah serta menyelaraskan tujuan rakyat dan pemerintah, rakyat mewajibkan pemerintah untuk bertanggung jawabkan pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepada pemerintah melalui mekanisme pelaporan keuangan secara periodik. Melalui laporan keuangan yang merupakan tanggung jawab pemerintah, rakyat melalui legislatif dapat mengukur, menilai sekaligus mengawasi kinerja pemerintah, sejauh mana pemerintah telah bertindak untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Produk Domestik Regional Bruto

Mengukur tingkat keberhasilan pembangunan suatu negara diperlukan tolak ukur dengan indikator sesuai dengan definisi dari ekonomi pembangunan itu sendiri, agar pembangunan ekonomi dapat berjalan sesuai yang diharapkan. Indikatornya adalah tingkat

pendapatan harus seimbang dengan pengeluaran dan harus seimbang pula dengan tingkat produksi. Indikator tersebut diharapkan diharapkan mampu mewakili atau merupakan model dari semua aspek atas pembangunan ekonomi. Salah satu tolok ukur untuk mengetahui tingkat keberhasilan pembangunan ekonomi yang sudah dilaksanakan adalah tersedianya data statistik Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan adanya data tersebut dapat diketahui tingkat pertumbuhan ekonomi, struktur perekonomian daerah, dan juga tingkat kemakmuran penduduk. Selain itu bagi para pengambil keputusan sebelum menentukan kebijakan lebih lanjut, data statistik PDRB dapat digunakan sebagai bahan evaluasi, analisa, dan bahan perencanaan yang selanjutnya bermanfaat untuk menentukan sasaran pembangunan di masa mendatang sehingga dapat berdaya guna dan tepat guna bagi masyarakat luas. Produk Domestik Regional Bruto adalah nilai tambah yang mampu diciptakan berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu wilayah (Saberan, 2002) PDRB merupakan penjumlahan dari semua harga dan jasa akhir atau semua nilai tambah yang dihasilkan oleh daerah dalam periode waktu tertentu (1 tahun).

Pajak Daerah

Pajak secara umum dapat diartikan sebagai iuran wajib anggota masyarakat kepada negara berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan (Siahaan, 2005). Sumber penerimaan pajak merupakan salah satu sumber potensi keuangan dari daerah tersebut. Hal ini dapat ditinjau pada sumber-sumber yang didapat dari PAD bahwa pajak daerah dari tahun ketahun memberikan sumbangan yang signifikan bagi perekonomian, sehingga potensi pengembangan dan penggalian potensi pajak dapat dimaksimalkan. Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak daerah adalah pajak negara yang diserahkan kepada daerah untuk dipungut berdasarkan peraturan perundangan yang dipergunakan untuk membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum publik.

Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pembayaran kepada negara yang dilakukan kepada mereka yang menggunakan jasa-jasa negara, artinya retribusi daerah sebagai pembayaran atas jasa atau karena mendapat pekerjaan usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan, atau jasa yang diberikan oleh daerah bagi secara langsung maupun tidak langsung (Sumitro dan Sutedi). Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah Pasal 1 ayat 64, Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

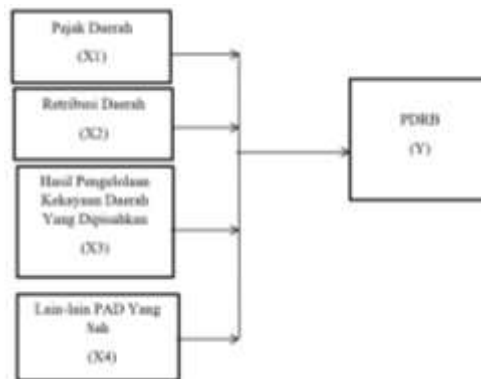
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (Halim, 2004). Hasil pengelolaan daerah yang sah merupakan pendapatan daerah dari keuntungan/laba bersih perusahaan daerah untuk anggaran belanja daerah yang disetor ke kas daerah baik perusahaan daerah yang modalnya sebagian terdiri dari kekayaan daerah yang dipisahkan. Perusahaan daerah seperti perusahaan air bersih (PDAM), Bank Pembangunan Daerah (BPD) adalah jenis-jenis BUMD yang memiliki potensi sebagai sumber-sumber PAD, menciptakan lapangan kerja atau mendorong pembangunan ekonomi daerah.

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menjelaskan pendapatan asli daerah yang sah, disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pendapatan ini juga merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah.

KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS



Hipotesis Penelitian

Berdasarkan teoritis dan kerangka konsep, maka hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut:

- H1 : Pajak Daerah berpengaruh positif terhadap PDRB
- H2 : Retribusi Daerah berpengaruh positif terhadap PDRB
- H3 : Hasil Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan berpengaruh positif terhadap PDRB.
- H4 : Lain-lain PAD Yang Sah berpengaruh Positif terhadap PDRB.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah asosiatif kausal. Jenis penelitian ini merupakan penelitian yang menganalisis hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya atau satu variabel mempengaruhi variabel lainnya. Penelitian asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh ataupun juga hubungan antara dua variabel atau lebih (Sugiyono, 2011)

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan pada 4 Provinsi yang ada di Pulau Sumatera yaitu, Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Riau, dan Provinsi Sumatera Barat pada tahu 2013-2020.

Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Riau dan Sumatera Barat periode 2013 sampai dengan 2020. Adapun teknik pengambilan sampel yaitu dengan menggunakan pendekatan Sampel Non-Probabilitas (*Non Probability Sampling*) dengan metode Pengambilan Sampel Jenuh. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 4 Provinsi dengan 8 tahun pengamatan sehingga objek penelitiannya sebesar 32.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah pada Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Riau, Pprovinsi Sumatera Barat. Sedangkan waktu penelitian dalam penelitian ini periode tahun 2013-2020.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan regresi data panel dengan *Eviews 7* dikarenakan dalam penelitian ini terdapat karakteristik data *cross section* dan *time series* secara bersamaan.

Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran profil data sampel. Penelitian ini menggunakan statistik deskriptif yang terdiri dari rata-rata, deviasi standar, minimum, dan maksimum.

Uji Asumsi Klasik

Penelitian yang menggunakan data panel memiliki kelebihan yaitu data yang digunakan lebih informatif, variabilitasnya lebih besar, kolinearitas yang lebih rendah diantara variabel dan banyak derajat bebas (*degree of freedom*) dan lebih efisien.

Uji Chow

Uji Chow test atau *likelihood ratio test* merupakan sebuah pengujian untuk memilih antara model *common effect* dan model *fixed effect* yang tepat. *Chow test* merupakan uji dengan melihat hasil F statistik untuk memilih model yang lebih baik antara model *common effect* atau *fixed effect*, apabila nilai probabilitas signifikansi F statistik lebih kecil dari tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$ maka H_0 diterima

Uji Hausman

Uji Hausman dalam menentukan model terbaik menggunakan statistic *chi square* dengan *degree of freedom* adalah sebanyak k, dimana k adalah jumlah variabel independen, apabila nilai statistik *chi square* lebih besar dibandingkan tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$ maka H_0 ditolak yang artinya model yang lebih baik adalah model *random effect*, apabila nilai statistik *chi square* lebih kecil dari tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$ maka H_0 diterima yang mengartikan bahwa model yang lebih baik adalah model *fixed effect* (Widarjono, 2013).

Analisis Regresi Data Panel

Penelitian ini menggunakan data panel. Data panel merupakan data gabungan dari data *cross section* dan data *time series* (Widarjono, 2013). Regresi dengan data panel diharuskan memilih beberapa model pendekatan yang paling tepat untuk mengestimasi data panel yaitu pendekatan model *Common Effect*, *Fixed Effect*, dan *Random Effect*. Pengujian dilakukan melalui alat analisis yaitu *software Eviews 7*.

Uji Simultan (F)

Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel terikat. Signifikan berarti hubungan yang terjadi dapat berlaku untuk populasi. jika nilai probabilitas $< 0,05$,

Uji Parsial (t)

Digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat diuji dengan tingkat keyakinan 95% atau $\alpha < 0,05$. Pengujian hipotesis yang digunakan dalam uji secara parsial

Koefisien Determinasi (R^2)

Pengujian kontribusi pengaruh seluruh variabel bebas bersama-sama terhadap variabel terikat dapat dilihat dari koefisien determinasi (R^2) dimana $0 < R^2 < 1$. Uji koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat (Ghozali, 2009).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Pemilihan Model Estimasi Regresi Data Panel

Dari ketiga model yang telah diestimasi akan dipilih model mana yang paling tepat/sesuai dengan tujuan penelitian. Ada tiga uji (test) yang dapat dijadikan alat dalam memilih model regresi data panel, yaitu : *Common Effect*), *Fixed Effect* (Efek Tetap) dan *Random Effect*. Berdasarkan karakteristik data yang dimiliki dapat dilakukan, yaitu: Uji Chow dan Uji Hausman.

Chow

Uji Uji Chow dilakukan untuk membandingkan/memilih model mana yang terbaik antara *common effect* dan *fixed effect*. Hasil uji *Chow* dapat dilihat ada Tabel 2 berikut:

Tabel 2. Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests
 Equation: Untitled
 Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	23.087412	(3,24)	0.0000
Cross-section Chi-square	43.435566	3	0.0000

Sumber : Data olahan peneliti (2019)

Keputusan yang diambil pada pengujian Chow adalah terima H_0 ($p\text{-value} > 0,05$) dengan hipotesis:

H_0 : model *common effects*

H_1 : model *fixed effects*

Jika nilai probabilitas (Prob.) untuk Cross-section F $> 0,05$ maka model yang terpilih adalah *Common Effect*, tetapi jika nilai Prob. Cross-section F $< 0,05$ maka model yang terpilih adalah *Fixed Effect*. Pada Tabel 5.2 terlihat bahwa nilai Prob. Cross-section F sebesar 0,0000 yang nilainya $< 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa menolak H_0 , yaitu metode *fixed effect* lebih tepat dibandingkan model *common effect*).

Uji Hausman

Uji Hausman dilakukan untuk membandingkan/memilih metode mana yang terbaik digunakan antara *fixed effect* atau *random effect*. Hasil uji Hausman dapat dilihat pada Tabel 3 sebagai berikut:

Tabel 3. Hasil Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test
 Pool: DPANEL
 Test period random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Period random	19.132955	4	0.0007

Sumber : Data olahan peneliti (2019)

Keputusan yang diambil pada pengujian Hausman adalah terima H_0 (p-value > 0,05) dengan hipotesis:

H_0 : metode *random effects*

H_1 : metode *fixed effects*

Jika nilai probabilitas (Prob.) Cross-section random > 0,05 maka model yang terpilih adalah *Random Effects*, tetapi jika nilai probabilitas (Prob.) Cross-section random < 0,05 maka model yang terpilih adalah *Fixed Effects*. Pada tabel terlihat bahwa nilai Prob. Cross-section random sebesar 0,0007 yang nilainya > 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa model *fixed effect* lebih tepat dibandingkan dengan model *random effect*. Berdasarkan pengujian dengan uji Chow dan uji Hausman maka diputuskan bahwa model estimasi yang paling tepat digunakan adalah *fixed effect* model.

Analisis Regresi Data Panel

Berdasarkan uji Chow dan uji Hausman yang dilakukan, maka model regresi yang terpilih adalah model *fixed effect*. Oleh karena itu, hasil regresi yang dilakukan melalui model *fixed effect* dapat dilihat pada Tabel.

Tabel 4. Analisis Regresi Data Panel

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-12.45368	0.854982	-14.56602	0.0000
X1	1.634642	0.141248	11.57282	0.0000
X2	-0.144291	0.115579	-1.248421	0.2239
X3	-0.111290	0.177321	-0.627620	0.5362
X4	-0.343900	0.069281	-4.963847	0.0000

Sumber : Data olahan peneliti (2022)

Berdasarkan Tabel 4 dapat dilihat hasil regresi dapat panel yang kemudian dapat disusun persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = -12,45 + 1,63X_1 - 0,14X_2 - 0,11X_3 - 0,34X_4 + e$$

Dari persamaan regresi dapat dinyatakan bahwa:

- 1) Nilai koefisien untuk variabel X1 (Pajak Daerah) sebesar 1,63 berarti pajak daerah berpengaruh positif terhadap PDRB. Nilai Prob. adalah 0,0000, yakni < 0,05, maka Pajak Daerah berpengaruh signifikan terhadap PDRB.
- 2) Nilai koefisien untuk variabel X2 (Retribusi Daerah) adalah -0,14, Retribusi Daerah berpengaruh negatif terhadap PDRB. Nilai Prob. adalah 0,2239, yakni > 0,05, maka retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap PDRB.
- 3) Nilai koefisien untuk variabel X3 (Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan) adalah sebesar -0,11, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan berpengaruh negatif terhadap PDRB. Nilai Prob. adalah 0,5362, yakni > 0,05, maka Hasil Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan tidak berpengaruh signifikan terhadap PDRB.
- 4) Nilai koefisien untuk variabel X4 (Lain-lain PAD Yang Sah) adalah sebesar -0,34, Lain-lain PAD yang sah berpengaruh negatif terhadap PDRB. Diketahui nilai Prob. adalah 0,0000, yakni < 0,05, maka lain-lain PAD yang sah berpengaruh signifikan terhadap PDRB.

Uji Hipotesis

Uji Simultan

Uji signifikan simultan (uji F) dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel bebas yang digunakan mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikatnya. Hasil uji simultan dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Uji Simultan (Uji F)

R-squared	0.958466	Mean dependent var	-3.632652
Adjusted R-squared	0.946352	S.D. dependent var	0.718584
S.E. of regression	0.166439	Akaike info criterion	-0.536059
Sum squared resid	0.664846	Schwarz criterion	-0.169625
Log likelihood	16.57694	Hannan-Quinn criter.	-0.414596
F-statistic	79.11988	Durbin-Watson stat	0.958120
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber : Data olahan peneliti (2022)

Nilai statistik F dan nilai probabilitas statistik F pada penelitian ini adalah 79,11988 dengan probabilitas 0.000000. Nilai probabilitas statistik F tersebut lebih kecil dari nilai signifikan $\alpha = 5\%$, maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak atau dengan kata lain pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan secara simultan berpengaruh terhadap PDRB.

Uji Parsial

Uji signifikan parsial (uji-t) dilakukan untuk mengetahui tingkat signifikan atau pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial, berikut adalah hasil pengujian parsial pada penelitian ini:

Tabel 6. Uji Parsial (Uji t)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-12.45368	0.854982	-14.56602	0.0000
X1	1.634642	0.141248	11.57282	0.0000
X2	-0.144291	0.115579	-1.248421	0.2239
X3	-0.111290	0.177321	-0.627620	0.5362
X4	-0.343900	0.069281	-4.963847	0.0000

Sumber : Data olahan peneliti (2022)

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Pengaruh Pajak Daerah Terhadap PDRB

Hasil pengujian yang dilakukan mendapatkan hasil prob 0,0000 (prob < 0,05) yang berarti bahwa pajak daerah berpengaruh terhadap PDRB. Adapun nilai koefisien adalah 1,63 yang artinya pajak daerah memiliki arah positif terhadap perkembangan pembangunan. Oleh karena itu hipotesis pertama penelitian ini diterima. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (2011) yang menyatakan bahwa Pajak Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap PDRB. Hasil yang sama juga diperoleh dalam penelitian yang dilakukan oleh Putri (2015) yang menyatakan bahwa pajak daerah berpengaruh positif signifikan terhadap PDRB. Kemampuan Pemerintah Daerah dalam mengelola potensi sumber daya alam yang ada sangat berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah. Semakin tinggi penerimaan pajak daerah maka akan meningkatkan pelayanan publik dalam bentuk infrastruktur maupun sarana dan prasarana akan semakin meningkat tiap tahunnya

Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap PDRB

Hasil pengujian yang dilakukan mendapatkan hasil prob 0,2239 ($\text{prob} > 0,05$) yang berarti bahwa retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap PDRB. Oleh karena itu, maka hipotesis kedua penelitian ini ditolak. Hasil ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Henri(2011) yang menyatakan bahwa Retribusi Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap PDRB. Penelitian ini sejalan dengan teori Solow-Swan, dimana pertumbuhan ekonomi tergantung pada penyediaan faktor-faktor produksi, salah satunya adalah akumulasi modal dalam hal ini adalah retribusi daerah. Berdasarkan teori tersebut diketahui bahwa variabel input khususnya retribusi daerah memiliki peranan penting karena akan menentukan besarnya jumlah output yang dihasilkan. Hal ini disebabkan retribusi daerah digunakan sebagai modal untuk melakukan pembangunan sehingga akan merangsang kegiatan ekonomi yang pada akhirnya akan meningkatkan PDRB.

Masih kecilnya penerimaan retribusi daerah dianggap memberikan pengaruh yang relatif kecil terhadap PDRB . Hal ini tentulah sangat disayangkan mengingat ada banyak daerah di Aceh, Sumatera Utara, Riau, dan Sumatera Barat yang berpotensi untuk meningkatkan pendapatan daerah dari retribusi daerah. Kurangnya pengelolaan retribusi daerah mengakibatkan penerimaan retribusi daerah tidak optimal.

Pengaruh Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Terhadap PDRB

Hasil pengujian yang dilakukan mendapatkan hasil prob 0.5362 ($\text{prob} > 0,05$) yang berarti bahwa hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tidak berpengaruh terhadap PDRB. Oleh karena itu, maka hipotesis ketiga penelitian ini ditolak. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa kekayaan daerah yang dipisahkan memiliki pengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap PDRB. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mulyadi Soamole (2011) yang menyatakan bahwa hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berpengaruh positif signifikan terhadap PDRB. Mungkin ini disebabkan kurangnya Perusahaan Daerah seperti PDAM, Perusahaan Perkreditan, dan Bank Pembangunan daerah masing-masing kota dan kabupaten di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Riau dan Sumatera Barat. Pengelolaan hasil kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan salah satu sumber PAD. Semakin banyaknya penerimaan dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan akan meningkatkan PAD, dan diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembangunan dan pelayanan publik yang semakin baik.

Pengaruh Lain-lain PAD Yang Sah Terhadap PDRB

Hasil pengujian yang dilakukan mendapatkan hasil prob 0,0000 ($\text{prob} < 0,05$) yang berarti bahwa lain-lain PAD yang sah berpengaruh terhadap PDRB. Adapun nilai koefisien - 0,34 yang artinya lain-lain PAD yang sah memiliki arah negative terhadap PDRB. Hasil ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Henri (2011) yang menyatakan bahwa Lain-lain PAD Yang Sah berpengaruh signifikan terhadap PDRB. Faktor yang menyebabkan adanya kenaikan dari lain-lain PAD itu sendiri dikarenakan masing-masing daerah telah meningkatkan pendapatan daerahnya di luar pajak, retribusi dan penyertaan modal pada perusahaan BUMD, dengan pendapatan dari jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan atas penjualan kekayaan daerah, adanya komisi dari penjualan barang oleh Pemda, adanya fasilitas sosial, dan masih banyak yang telah ditetapkan kebijakan oleh Pemda masing-masing daerah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB.
2. Retribusi daerah berpengaruh negatif terhadap PDRB, namun tidak signifikan.
3. Hasil kekayaan daerah yang dipisahkan berpengaruh negatif terhadap PDRB, namun tidak signifikan.
4. Lain-lain PAD yang sah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap PDRB

Saran

Adapun saran yang dapat diberikan atas dasar kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penelitian selanjutnya sebaiknya memperluas populasi pengamatan sehingga dapat dilihat kondisi secara umum pada seluruh Provinsi di Indonesia.
2. Peneliti selanjutnya diharapkan menambah jumlah variabel independen lainnya yang mungkin berpengaruh terhadap PDRB.
3. Peneliti selanjutnya diharapkan menambah sampel data dengan memperpanjang periode pengamatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*, Edisi Revisi, Salemba Empat, Jakarta.
- Adesoji Adetunji Adenugba, Chike Faith Ogechi (2013). *The Effect of Internal Revenue Generation on Infrastructural Development. A study of Lagos State Internal Revenue Service.*
- Ali Abdulkadir Ali, Ali Yassin Sheikh Ali, Mohamed Saney Dalmar (2018). *The Impact of tax revenues on economic growth: A time series evidence from Kenya*
- Andres Rodríguez-Pose, and Anne Krøijer (2009). *“Fiscal Decentralization and Economic Growth in Central and Eastern Europe.”*
- Ardhansyah Putra, 2016. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Dana Perimbangan sebagai Pemoderasi di Kabupaten/Kota di Sumatera Utara.
- Bastian, Indra, 2001. *Akuntansi Sektor Publik*, BPFE, Yogyakarta
- Branimir Kalas, Vera Mirovic, Nada Milenkovic (2018). *“The Relationship between taxes and economic growth: evidence from Serbia, and Croatia”*
- Chien-Hsun Chen, 2018. *Fiscal Structures and regional economic growth evidence from China's fiscal contract system*
- Cordelia Onyinyechi Omodero, Michael Chidiebere Ekwe & John Uzoma Ihendinihu. *“The Impact of Internally Generated Revenue on Economic Development in Nigeria.”*
- Daud Widodo Immanuel Panggabean, 2017. Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2011-2015
- Devas, Nick, 1989. *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*, Jakarta: UI Press
- Dewi, Elita, 2002. Identifikasi Sumber Pendapatan Asli Daerah dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*: USU.
- Erlina, Sri Mulyani, 2007. *Metodologi Penelitian Bisnis: Untuk Akuntansi dan Manajemen*. Cet. 1.-USU Press, Medan.
- Eva Wulandari, 2017. *Effect of Original Local Government Revenues, General Allocation Funds, Special Allocation Funds, Share Funds, Other Legal Revenues, Budget Surplus/Deficit to Human Development Index Through Capital Expenditures: Case Study of Regencies/Municipalities in Indonesia.*
- George Ogbonna, Ndubuisi Odoemelam (2015). *Impact of taxation on economic development of Nigeria: 2000-2013*. University of Nigeria.
- Grace N. Ofoegbu, David O. Akwu, Oliver O (2016). *Empirical analysis of effect of tax*

- revenue on economic development of Nigeria. International Journal of Asian Social Science*, 2016, 6(10): 604-613.
- Guntur Hendriwiyanto dan Nur Kholis 2014.. Pengaruh Pendapatan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Mediasi.
- Halim, Abdul, Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi ketiga: Salemba Empat, Jakarta, 2007.
- Henry, 2011. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Perkembangan Pembangunan di Kabupaten Deli Serdang. Skripsi: USU
- Hlalefang Khobai, Khumbuzile Dladla (2018). *The impact of Taxation on Economic Growth in South Africa. Nelson Mandela University.*
- Husain (2013) “ *The Influence of Local Taxes and Levies Towards Expenditure Allocation in Kota Gorontalo, Indonesia*”.
- Imam Mukhlis and Timbul Hamonangan Simanjuntak (2018). “*The Relationship between Capital Expenditure, Income Inequality, Total Population and Economic Growth Post-Implementation of Local Autonomy in Indonesia*”. *Journal of Economic Cooperation and Development*, 39, 1 (2018), 63-82
- Lerato Riba (2016). *The relationship between tax and economic growth: A South African perspective. The Development Finance Centre, Graduate School of Business, University of Cape Town*
- Mahmudi, 2010. Manajemen Keuangan Daerah. Jakarta: Erlangga
- Mardiasmo, 2002. Akuntansi Sektor Publik, Penerbit Andi: Yogyakarta.
- Moelyadi Soamole, 2011. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Penyelenggaraan Pembangunan Daerah (studi kasus kepulauan Sula)
- Musaga, Brian (2007). *Effects of taxation on economic growth: (Uganda's Experience: 1987-2005)*
- Nasution, Faisal Akbar, 2009. Pemerintah Daerah dan Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah. Jakarta: Sofmedia
- Okwara, Cornelius Collins (2017). *Impact of Tax Revenue on Economic Growth in Nigeria.*
- Onakoya., Adegbelemi Babatunde and Somoye, Russell Olukayode Christopher (2013). " *The Impact of Public Capital Expenditure and Economic Growth in Nigeria.* "
- Prakoso, Kesit Bambang, 2003. Pajak dan Retribusi Daerah.. Yogyakarta: UI Press.
- Pratomo, Wahyu Ario dan Paidi. 2007. Pedoman Praktis Penggunaan Eviews Dalam Ekonometrik. Medan : USU Press.
- Rochmat Soemitro, 1988. Asas dan Dasar Perpajakan. Bandung : Eresco
- Saragih, Panglima. 2003. Desentralisasi Fiskal Dan Keuangan Daerah Dalam Otonomi, PT Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Shih-Ying Wu, Jenn- Hong Tang, Eric S. Lin (2010). “ *The impact of government expenditure on economic growth: How sensitive to the level of development?*.”
- Siahaan, Marihot P. 2005. Pajak dan Retribusi Daerah. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Simanjuntak, Daslan 2006. Analisis Pengaruh PAD Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Labuhan Batu. Tesis. Sumatera Utara : Magister Ekonomi Pembangunan USU.
- Sitompul, Novita Linda, 2005. Analisis Pengaruh Investasi dan Tenaga Kerja Terhadap PDRB Sumatera Utara. Tesis. Sumatera Utara : USU.
- Sutedi, Andrian, Hukum Pajak dan Retribusi Daerah: Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008.
- Timothy J. Bartik. “ *The Effects of State and Local Taxes on Economic Development: A Review of Recent Research.* ”
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- _____. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah:
<http://keuda.kemendagri.go.id/produk hukum/download/60/uuno28-tahun-2009>

Wiratno, Bagus, 2011. Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Tingkat Investasi dan Tenaga Kerja terhadap PDRB Jawa Tengah. Skripsi UNDIP.

www.djpk.kemenkeu.go.id

www.bps.go.id

Zuwesty Eka Putri ,2015. Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.